Puasa Untuk Bumi

Gede H. Cahyana

Lektor Kepala Teknik Lingkungan Universitas Kebangsaan

Koran Pikiran Rakyat, 22 April 2021

Tema peringatan Hari Bumi (*Earth Day*) tahun 2021 ini adalah *Restore the Earth*. Pulihkan Bumi. Satu-satunya planet di tatasurya yang bisa didiami oleh manusia ini sedang sakit. Satu di antara beberapa cara untuk memulihkannya adalah puasa. Puasa dari aktivitas yang mencemari Bumi. Siapa yang harus puasa? Setiap orang sebagai individu dan orang sebagai pengelola masyarakat, yaitu pemerintah (pusat dan daerah). Ada tiga matra yang harus direstorasi dengan cara puasa, yaitu tanah, air dan udara.

Untuk tanah, setiap orang hendaklah puasa dari buang sampah botol plastik atau mengurangi (*reduce*) botol sejenis. Berikan botol kepada pemulung agar digunakan untuk keperluan lain (*reuse, recycle*). Bagaimana dengan sumber sampah botol plastik, yaitu pabrik makanan dan minuman, apakah harus ditutup? Haruskah pabrik *softdrink* dan makanan kemasan dihentikan? Jutaan orang bekerja di sektor industri makanan-minuman kemasan ini, mulai dari industri petrokimia hingga varian industri di hilirnya. Solusinya adalah gunakan bahan kemasan plastik yang ramah tanah sehingga mudah dihancurkan oleh mikroba tanah.

Adapun sampah organik seperti sisa nasi, sayur, ikan, daging, buah-buahan sebaiknya tidak dibuang ke luar rumah tetapi ditanam di dalam lubang di halaman rumah. Semiminal mungkin ditaruh di bak sampah yang akan diangkut oleh petugas sampah untuk dibawa ke TPA sampah. Memang faktanya tidak bisa 100% tetapi bisa diupayakan sesedikit-sedikitnya. Sekian waktu kemudian sampah organik yang ditanam ini akan berubah menjadi pupuk. Bisa digunakan untuk pupuk tanaman hias, cabe, tomat, dll. Sampah organik ini menjadi penyubur tanah dan ikut memulihkan fertilitas tanah (Bumi). Tanah adalah bioreaktor alamiah yang mampu mengubah zat organik jasad manusia, hewan dan tumbuhan menjadi banyak unsur hara di dalam pupuk (fertilizer).

Bagaimana dengan peran pemerintah? Pemerintah merilis peraturan yang berpihak kepada kelestarian fungsi lingkungan dan peraturan ini wajib dilaksanakan oleh investor yang mengeksploitasi tanah untuk tambang batubara, emas, perak, nikel, minyak, gas, dll. Peraturan tersebut hendaklah dilaksanakan secara konsekuen. Tidak perlu terlalu banyak peraturan, apalagi setiap tahun ada peraturan baru sehingga terjadi inflasi peraturan. Apabila peraturan yang ada dilaksanakan secara taat asas maka hasilnya tentu efektif. Lemahnya penegakan hukum lingkungan inilah yang menjadi masalah saat ini.

Sebagai contoh, setiap pohon di kota yang tumbuh di tanah milik negara haruslah dirawat dan dipantau berkala. Tidak perlu semua pohon dipantau. Yang wajib dipantau adalah pohon besar yang rapuh akarnya atau pangkal batangnya berlubang. Kalau bisa disembuhkan tentu lebih baik dipertahankan. Kalau tidak bisa maka segera diregenerasi dengan pohon sejenis kemudian pohon yang sakit ini ditebang sebelum tumbang. Upayakan juga pohon-pohon

tersebut tidak silang sengkabut dengan kabel telepon apalagi kabel listrik. Cegahlah korban harta dan jiwa sebelum terjadi.

Untuk air, setiap orang puasa dari perilaku buang air besar sembarang (*open defecation*). BABS ialah buang tinja di kebun, ladang, hutan, semak, sungai, selokan, pantai. Setiap rumah harus memiliki septic tank. Tugas pemerintah adalah menambah septic tank komunal di permukiman padat terutama di daerah kumuh (*slum area*) dan di daerah lain yang membutuhkan. Adapun pemilik pabrik tidak hanya wajib memiliki IPAL tetapi yang jauh lebih penting adalah wajib mengoperasikan IPAL dengan benar. Sebab, IPAL bukanlah lampu Aladdin, perlu dioperasikan dan dirawat sesuai dengan SOP. Demikian juga pemilik kebun dan sawah harus mengurangi pestisida agar air tanah dan air sungai terbebas dari racun pestisida terutama air yang digunakan oleh PDAM untuk air minum.

Untuk udara, setiap orang sebisa-bisanya tidak membakar sampah. Gunakan sepeda untuk jarak dekat di dalam perumahan atau berjalan kaki. Pemerintah bertugas menyediakan transportasi masal yang nyaman dan menggunakan bahan bakar ramah udara. Kendaraan listrik menjadi opsi penting meskipun belum tentu lebih ekonomis. Adapun pabrik semampunya mengurangi penggunaan batubara meskipun sudah dinyatakan bukan limbah B3 lagi oleh PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diturunkan dari UU Cipta Kerja. Keputusan ini dinyatakan fatal dan menysakan pro-kontra di ranah pegiat dan pengamat lingkungan.

Andaikata semua aktivitas tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat berarti masyarakat tidak berniat serius untuk memulihkan kondisi Bumi. Begitu juga pemerintah, apabila peraturan hanya sekadar dibuat apalagi berpotensi merusak tanah, air, udara maka berarti pemerintah tidak berniat serius untuk menyembuhkan Bumi. Keikutsertaan pemerintah dalam peringatan Hari Bumi hanyalah rutinitas proforma yang tidak berdampak penting bagi Bumi dan sekadar *business as usual* serta teposaliro belaka kepada negara lain.

Apabila demikian realitasnya maka keengganan masyarakat dan pemerintah berpuasa untuk memulihkan Bumi kalah jauh dengan masyarakat dan pemerintah Amerika Serikat 51 tahun yang lalu. Kalah oleh spirit seorang ibu rumah tangga, Rachel Carson, penulis buku *The Silent Spring* (Musim Bunga yang Sunyi). Spiritnya ini kemudian disebarkan oleh senator Wisconsin Gaylord Nelson dalam orasi ekopolitiknya di Seattle pada tahun 1969. Tahun berikutnya sekitar 20 juta orang mengikuti deklarasi *Earth Day* pada 22 April 1970.

Tampaklah, individu dan pemerintah bersama-sama peduli pada kerusakan lingkungan akibat pencemaran tanah, air dan udara. Respons positif pada saat itu langsung diberikan oleh Presiden Richard Nixon dengan mendirikan *Environmental Protection Agency* (EPA) pada 2 Desember 1970 dan sukses merilis *the Clean Water Act*, *the Clean Air Act*, *the Endanger Species Act*.

Padahal jauh sebelum tahun 1970 itu, yaitu tahun 1945, Indonesia sudah memiliki pasal sosioekologi: pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang eksplisit menyatakan bahwa Bumi (tanah), air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Deklarasi di dalam konstitusi negara kita ini sudah ada jauh sebelum Amerika Serikat peduli pada kerusakan lingkungan.

Kenapa sekarang justru kita tertinggal dalam ranah kepedulian terhadap lingkungan dan lebih mementingkan investasi yang merusak ekologi? Mampukah kita memulihkan Bumi jika demikian? Selamat memperingati Hari Bumi di tengah pandemi Covid-19. Selamat berpuasa untuk Bumi. *

PikiranRakyat
KAMIS (RON) 22 APRIL 2021
10 RAMADAN 1442 H
PUASA 1954

OPINI

e-mail: opini@pikiran-rakyat.com

Tajuk RENCANA

Ipas dan Pokir

NAMUN, tidak tertutup kemungkinan, hal serupa juga terjadi di berbagai kabupaten/kota yang melibatkan anggota DPRD Jabar dan mantan anggota DPRD Jabar. Apalagi, dalam pernyataannya kepada KPK, Ade Barkah menandatangani, penetapan anggaran, termasuk usulan pokir, adalah kolektif kolejial.

KPK menduga Ade Barkah menerima suap Rp 750 juta dan Siti Aisyah diduga menerima Rp 1.050 miliar. Ade Barkah dan Siti Aisyah menambuh panjang jumlah tersangka dalam kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 Oktober 2019 silam di Indramayu.

Dari OTT itu, KPK menetapkan empat tersangka dan menyita uang Rp 685 juta. Keempatnya telah diwonis. Mereka ialah Supendi (Bupati Indramayu 2014-2019), Omanyah (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu), Wempy Tryono (Kahid Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Indramayu), dan Carsa ES (pengusaha).

Dari empat tersangka itu, pada Agustus 2020, KPK menetapkan Abdul Rozaq Muslim sebagai tersangka dan kini dalam proses sidang. Rozaq adalah anggota DPRD Provinsi Jabar 2014-2019 dan 2019-2024 dari Partai Golkar.

Terkini, walau belum terakhir, Ade Barkah dan Siti Aisyah yang menjadi pesakitan kasus korupsi, juga karena kasus yang sama. Keduanya juga dari Partai Golkar. Mereka diketahui sebagai dua orang yang paling berperan agar aspirasi-uspirasi dari konstituen para anggota dewan di dapilnya masing-masing, disetujui kolektif. Keduanya yang rajin kasak-kusuk ke Bappeda Jabar untuk memastikan aspirasi tersebut atau yang dinamakan pokok-pokok pikiran (pokir) masuk dalam APBD Provinsi Jabar.

Saat itu, Pemprov Jabar masih dipimpin Ahmad Heryawan. Dan, hasil penyelidikan KPK, modus tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Untuk kasus Indramayu saja, sudah sejak 2017.

Namun, tidak tertutup kemungkinan, hal serupa juga terjadi di berbagai kabupaten/kota yang melibatkan anggota DPRD Jabar dan mantan anggota DPRD Jabar. Apalagi, dalam pernyataannya kepada KPK,

Puasa untuk Bumi

Gede H Cahyana
Lektor Kepala Teknik Lingkungan
Universitas Kebangsaan

TEMA peringatan Hari Bumi (Earth Day) tahun 2021 ini adalah *Restore the Earth*. Pulihkan Bumi. Satu-satunya planet di tata surya yang bisa didiami oleh manusia ini sedang sakit. Satu di antara beberapa cara untuk memulihkannya adalah puasa. Puasa dari aktivitas yang mencemari Bumi.

Siapa yang harus puasa? Setiap orang sebagai individu dan orang sebagai pengelola masyarakat, yaitu pemerintah (pusat dan daerah). Ada tiga mata yang harus direstorasi dengan cara puasa yaitu tanah, air, dan udara.

Untuk tanah, setiap orang hendaklah puasa dari buang sampah botol plastik atau mengurugi (reduce) botol sejenis. Berikan botol kepada pemulung agar digunakan untuk keperluan lain (reuse, recycle). Gunakan bahan kemasan plastik yang ramah tanah sehingga mudah di-hancurkan mikroba tanah.

Adapun sampah organik seperti sisa nasi, sayur, ikan, daging, buah-buahan, sebaiknya tidak dibuang ke luar rumah tetapi ditanam di dalam lubang di halaman rumah. Semaksimal mungkin ditaruh di bak sampah yang akan diangkut oleh petugas sampah untuk dibawa ke TPA sampah.

Memang faktanya tidak bisa 100% tetapi bisa dipayak sedikit demi sedikit. Sekian waktu kemudian sampah organik yang ditaman ini akan berubah menjadi pupuk. Sampah organik ini menjadi penyubur tanah dan ikut memulihkan fertilitas tanah (fertilizer).

Tanah adalah bioreaktor alamiah yang mampu mengubah zat organik jasad manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi banyak unsur hara di dalam pupuk (fertilizer).

Konsekuensi

Pemerintah telah meluluskan peraturan yang berpihak pada kelestarian fungsi lingkungan. Peraturan ini wajib dilaksanakan oleh investor yang mengeksploitasi tanah untuk tambang, batu bara, emas, perak, nikel, minyak, gas, dan lain-lain.

Peraturan tersebut hendaklah dilaksanakan secara konsekuen. Tidak perlu terlalu banyak peraturan, apalagi setiap tahun ada peraturan baru sehingga terjadi inflasi peraturan.

Apabila peraturan yang ada dilaksanakan secara tangkas, hasilnya tentu efektif. Lemahnya penegakan hukum lingkungan inilah yang menjadi masalah saat ini.

Sebagai contoh, setiap pohon di kota yang tumbuh di tanah milik negara haruslah dirawat dan dipantau berkala. Tidak perlu semua pohon dipantau. Yang wajib dipantau adalah pohon besar yang rapuh akarnya atau pangkai batangnya berlobang. Kalau bisa disemprotkan tentu lebih baik dipertahankan. Kalau tidak bisa, segera diregenerasi dengan pohon sejenis. Kemudian pohon yang sakit ini ditebang sebelum tumbang.

Upayakan juga pohon-pohon tersebut tidak silang sengkut dengan kabel telepon apalagi kabel listrik. Cegahlah korban harta dan jiwa sebelum terjadi.

Untuk air, setiap orang puasa dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS). BABS yaitu buang tinja di kebun, ladang, hutan, semak, sungai, selokan, pantai. Setiap rumah harus memiliki septic tank.

Tugas pemerintah adalah menambah septic tank komunal di permukiman padat, terutama di daerah kumuh dan di daerah lain yang membutuhkan.

Pemilik pabrik tidak hanya wajib memiliki IPAL, tetapi yang jauh lebih penting adalah wajib mengoperasikan dalam pemertanian Hari Bumi hanyalah rutinitas proforma yang tidak berdampak penting bagi Bumi, sekadar *business as usual* serta tepa selira belaka kepada negara lain.

Padahal, Indonesia sudah memiliki pasal sosiologi: Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

wisata

OBJEK wisata boleh beroperasi selama Lebaran.

- Mudik dilarang, piknik dibolehkan.

penyekatan

POLDA Jabar siapkan 120 titik penyekekatan.

- Waspadai jalan-jalan tikas.

ambles

JALAN ambles membahayakan pengendara.

- Entong diantep.

Si Kabayan

yang secara eksplisit menyatakan, Bumi (tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Deklarasi di dalam konstitusi negara kita ini sudah ada jauh sebelum Amerika Serikat peduli pada kerusakan lingkungan. Kenapa sekarang justru kita tertinggal dalam ranah kepedulian terhadap lingkungan dan lebih mementingkan investasi yang merusak ekologi?

Selamat memperingati Hari Bumi di tengah pandemi Covid-19. Selamat berpuasa untuk Bumi.***